



PEMERINTAH KOTA SERANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
(BPKAD)

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek KSB Serang  
Telp. (0254) 209027



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**(BPKAD)**

*Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang, Banten Telp. (0254) 209027 Fax (0254) 209072*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KOTA SERANG**

**Nomor : 900 / Kep. - BPKAD /2023**  
**tentang**

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD**  
**KOTA SERANG TAHUN 202**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Serang Nomor tahun ... tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023. Untuk pelaksanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang;
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023.

**KEDUA** : Renja sebagaimana Diktum Pertama dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

### **BAB IV NIHIL**

### **BAB V PENUTUP**

**KETIGA** : RENJA sebagaimana Diktum Kedua merupakan pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, Maret 2021  
Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Serang

WACHYU B KRISTIAWAN  
NIP. 19741003 199311 1 003



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 ini telah selesai disusun.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan sesuai dengan amanat dalam RPJMD Kota Serang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Renja pada tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang.

Serang, Maret 2022

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Serang



**WACHYU B KRISTIAWAN**

NIP. 19741003 199311 1 003



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3. Program, Kegiatan dan sub kegiatan	40
<b>BAB IV NIHIL</b>	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	48



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai Rencana Pembangunan Tahunan (Renja OPD) yang merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Oleh karena itu berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perlu disusun RKPD Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan KUA-PPA yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 juga sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023 dimana dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023, disebutkan pada Bab I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Serang tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2018-2023.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta



---

masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Proses penyusunan Renja OPD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja OPD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan Kepala OPD tentang pembentukan tim penyusunan Renja OPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renja OPD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja OPD sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Renja OPD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan Renja OPD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja OPD.
- c. Pelaksanaan Forum OPD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- d. Penetapan Renja OPD. Selaras dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, perlu dilakukan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah disusun menjadi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan indikator kinerja kegiatan dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



---

(RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Renstra BPKAD yang telah ditetapkan.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;



8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
9. Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2020
10. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2023 bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Tujuan dibuatnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Menjadikan Pedoman dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang pada tahun 2023;
4. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan, Sub kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD Tahun 2023 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar



---

penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala BPKAD Kota Serang.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. NIHIL

##### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BPKAD Kota Serang yaitu pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dinilai dari sisi pengelolaan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah serta dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang melaksanakan 2 Program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.593.842.413 dan realisasi sebesar Rp.26.070.943.579 atau 88,10 %, dengan rincian: realisasi diatas 90% sebanyak 47 sub kegiatan, realisasi antara 80% - 90% sebanyak 8 sub kegiatan, realisasi antara 70% - 80% sebanyak 2 sub kegiatan , dan realisasi di bawah 60% sebanyak 3 sub kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan dari 60 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan terdapat 60 sub kegiatan dan realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan terdapat 1 sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah



Alasan : *Realisasi anggaran bergantung kepada output yang dihasilkan BPN selaku lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi tanah, dalam pelaksanaan masih banyak permohonan sertifikasi yang belum diselesaikan sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran.*

Pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan seperti yang diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan badan dilakukan secara efisien dan efektif. Dilihat dari persentase pencapaian target / rencana tingkat capaian per kegiatan, hampir semua kegiatan dilaksanakan dengan persentase pencapaian target / rencana tingkat capaian lebih besar dari 100 % karena target fisik terpenuhi dengan anggaran yang masih tersisa sehingga tercipta efisiensi anggaran.

Adapun dari sisi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 Program, 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program merupakan instrument kebijakan dimana didalamnya memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan telah ditetapkan dan memperoleh persetujuan alokasi anggaran . Program strategis yang di rencanakan oleh BPKAD Kota Serang harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang secara efektif dan efisien. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang pada tahun 2021 terdapat 2 Program, 12 Kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan, kegiatan- kegiatannya adalah :
  1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
    - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
    - e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA – SKPD



- 
- f. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
      - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordiansi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - c. koordiansi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
  3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - c. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan bahan logistik kantor
    - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - f. Fasilitas kunjungan tamu
    - g. Penyediaan bahan bacaan dan peaturan perundang-undangan
    - h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
    - c. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyediaan jasa surat menyurat
    - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor



- 
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
    - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Program Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan- kegiatannya adalah:
    1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, sub kegiatannya adalah:
      - a. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
      - b. Koordiansi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
      - c. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA – SKPD
      - d. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA – SKPD
      - e. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA – SKPD
      - f. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA – SKPD
      - g. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepa daerah tentang penjabaran APBD
      - h. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
      - i. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
      - j. Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
      - k. Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah
    2. Koordiansi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, sub kegiatannya adalah:
      - a. Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
      - b. Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
      - c. Penatausahaan pembiayaan daerah
      - d. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Fihak ketiga
      - e. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait



3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, sub kegiatannya adalah:
  - a. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
  - b. Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban
  - c. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
  - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota
  - e. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
  - f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - g. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
  - h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
  - i. Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan-kegiatannya adalah :
  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, sub kegiatannya adalah:
    - a. Penyusunan standar harga
    - b. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
    - c. penatausahaan barang milik daerah
    - d. Inventarisasi barang milik daerah
    - e. Pengamanan barang milik daerah
    - f. Penilaian barang milik daerah
    - g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
    - h. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
    - i. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah

j. Penyusunan laporan barang milik daerah

k. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

Jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 29.593.842.413 dan realisasi sebesar Rp.26.070.943.579 atau 88,10 %, uraian kegiatan beserta capaian indikator outputnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Penunjang Urusan Pemerintahan BPKAD Kota Serang yang terdiri dari 8 kegiatan, realisasi anggaran sebesar 89,79%. Dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, kegiatannya terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 903.992.920 dari target Rp. 982.092.500 atau 92,05%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 264.307.920 dari target Rp 271.000.000 atau 97,53%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 5 dokumen dari target 5 dokumen atau 100%.
  - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 93.059.000 dari target Rp 93.500.000 atau 99,53%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 83.689.750 dari target Rp 85.151.250 atau 98,28%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 284.281.250 dari target Rp 348.836.250 atau 81,49%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ Evaluasi kinerja perangkat daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 178.655.000 dari target Rp 183.605.000 atau 81,49%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 3 dokumen dari target 3 dokumen atau 100%.



- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 16.122.045.792 dari target Rp. 18.319.574.982 atau 88,00% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran sebesar Rp 15.656.270.792 dari target Rp 17.852.604.982 atau 87,70%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%.
  - ❖ Koordiansi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 141.844.000 dari target Rp 142.615.000 atau 99,46%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ koordiansi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 323.931.000 dari target Rp 324.355.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 117.580.000 dari target Rp. 117.600.000 atau 99,98%, dan capaian kinerja terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan atau 100 %, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 117.580.000 dari target Rp. 117.600.000 atau 99,98%, dan capaian kinerja terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan atau 100 %.
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 39.600.000 dari target Rp. 40.000.000 atau 99,00% dan capaian kinerja terealisasi 1 kegiatan dari target 1kegiatan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Pengadaan pakaian dinas beserta atribut realisasi anggaran sebesar Rp. 39.600.000 dari target Rp. 40.000.000 atau 99,00% dan capaian kinerja terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%.



- Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 977.451.105 dari target Rp. 982.650.902 atau 99,47% dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 47.689.000 dari target Rp 49.331.103 atau 96,67%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 197.654.000 dari target Rp 198.517.351 atau 99,57%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan bahan logistik kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 165.426.000 dari target Rp 165.820.306 atau 99,76%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi anggaran sebesar Rp 331.188.050 dari target Rp 332.790.979 atau 99,52%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan bahan bacaan dan peaturan perundang-undangan, realisasi anggaran sebesar Rp 59.872.000 dari target Rp 60.026.163 atau 99,74%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Fasilitas kunjungan tamu, realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dari target Rp 15.000.000 atau 100,00%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 160.622.055 dari target Rp 161.165.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.



- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 343.600.000 dari target Rp. 359.781.550 atau 95,50%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 178.600.000 dari target Rp 179.781.550 atau 99,34%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 165.000.000 dari target Rp 180.000.000 atau 91,67%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 636.086.881 dari target Rp. 676.252.229 atau 94,06%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Penyediaan jasa surat menyurat, realisasi anggaran sebesar Rp 47.476.000 dari target Rp 48.000.000 atau 98,91%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, realisasi anggaran sebesar Rp 272.356.381 dari target Rp 307.000.000 atau 88,72%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 316.254.500 dari target Rp 321.252.229 atau 98,44%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.292.684.500 dari target Rp. 1.358.632.000 atau 95,15%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 12 bulan dari target 12 bulan atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:



- ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, realisasi anggaran sebesar Rp 948.268.400 dari target Rp 1.013.500.000 atau 93,56%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 194.691.100 dari target Rp 195.132.000 atau 99,77%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 10 dokumen dari target 10 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp 149.725.000 dari target Rp 150.000.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 gedung dari target 2 gedung atau 100%.
2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 3 kegiatan realisasi anggaran sebesar 91,92% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, kegiatannya terdiri dari:
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.390.064.100 dari target Rp. 2.651.513.000 atau 90,14%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
    - ❖ Penyusunan KUA dan PPAS, realisasi anggaran sebesar Rp 580.365.500 dari target Rp 614.482.000 atau 94,45%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
    - ❖ Penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, realisasi anggaran sebesar Rp 117.466.000 dari target Rp 219.621.000 atau 53,49%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
    - ❖ Penyusunan dan Review RKA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 163.125.000 dari target Rp 164.189.000 atau 99,35%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 33 OPD dari target 33 OPD atau 100%.
    - ❖ Penyusunan dan Review Perubahan RKA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 143.775.000 dari target Rp 164.060.000 atau 87,64%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 33 OPD dari target 33 OPD atau 100%.



- ❖ Penyusunan dan Review DPA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 27.145.000 dari target Rp 31.200.000 atau 87,00%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
- ❖ Penyusunan dan Review Perubahan DPA SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp 25.720.000 dari target Rp 31.200.000 atau 82,44%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, realisasi anggaran sebesar Rp 363.615.050 dari target Rp 378.659.000 atau 96,03%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
- ❖ penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, realisasi anggaran sebesar Rp 562.127.100 dari target Rp 598.768.000 atau 93,88%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Penyusunan regulasi bidang anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp 113.297.800 dari target Rp 124.655.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 OPD dari target 2 OPD atau 100%.
- ❖ Koordinasi perencanaan anggaran Pendapatan daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 124.855.000 dari target Rp 153.504.000 atau 81,34%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 9 OPD dari target 9 OPD atau 100%.
- ❖ Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 168.572.650 dari target Rp 171.175.000 atau 98,48%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 33 OPD dari target 33 OPD atau 100%.
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 989,892,510 dari target Rp. 1.094,046,250 atau 90,48%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 14276 dokumen dari target 14276 dokumen atau 100%, sub kegiatannya terdiri dari:



- ❖ Koordinasi dan pengelolaan kas daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 161.096.510 dari target Rp 199.559.000 atau 80,73%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 3 dokumen dari target 3 dokumen atau 100%.
- ❖ Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D, realisasi anggaran sebesar Rp 281.210.000 dari target Rp 282.833.000 atau 99,43%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 3 Kegiatan dari target 3 Kegiatan atau 100%.
- ❖ Penatausahaan Pembiayaan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 243.916.000 dari target Rp 283.613.000 atau 86,00%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 Kegiatan dari target 2 Kegiatan atau 100%.
- ❖ Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan Pihak ketiga, realisasi anggaran sebesar Rp 210.700.000 dari target Rp 233.537.250 atau 90,22%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 115 orang dari target 115 orang atau 100%.
- ❖ Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait, realisasi anggaran sebesar Rp 92.970.000 dari target Rp 94.504.000 atau 98,38%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 100%.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.325.930.750 dari target Rp. 1.374.073.000 atau 96,50%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, sub kegiatannya terdiri dari:
  - ❖ Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 294.570.000 dari target Rp 284.865.000 atau 99,87%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 100%.
  - ❖ Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, realisasi anggaran sebesar Rp 58.197.500 dari target Rp 63.220.000 atau 92,06%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 100%.



- ❖ Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 266.573.500 dari target Rp 268.632.250 atau 99,23%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
  - ❖ Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/kota, realisasi anggaran sebesar Rp 366.625.750 dari target Rp 396.809.750 atau 92,39%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Rekonsiliasi Realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, realisasi anggaran sebesar Rp 59.065.000 dari target Rp 61.692.000 atau 95,74%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 64.920.000 dari target Rp 82.210.000 atau 78,97%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 27.900.000 dari target Rp 27.985.000 atau 99,70%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
  - ❖ Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota, realisasi anggaran sebesar Rp 188.079.000 dari target Rp 188.659.000 atau 99,69%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 198 dokumen dari target 198 dokumen atau 100%.
3. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Capaian Kinerja yang terdiri dari 1 kegiatan realisasi anggaran sebesar 87,46% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100% kegiatannya terdiri dari :
- Pengelolaan Barang Milik Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.432.261.380 dari target Rp. 1.637.626.000 atau 87,46%, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 100%, sub kegiatannya terdiri dari:



- ❖ Penyusunan Standar Harga, realisasi anggaran sebesar Rp. 197,931,000 dari target Rp. 200,834,000 atau 98,55 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 Dokumen dari target 2 Dokumen atau 100%
- ❖ Koordinasi dan Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 77,983,000 dari target Rp. 79,258,000 atau 98,39 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 198 Orang dari target 198 Orang atau 100%
- ❖ Penatausahaan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 305,860,000 dari target Rp. 309,918,000 atau 98,69 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%
- ❖ Inventarisasi BMD, realisasi anggaran sebesar Rp. 59,880,000 dari target Rp. 61,479,000 atau 99,62 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%
- ❖ Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 162,765,880 dari target Rp. 291,980,000 atau 55,75 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 36 dokumen dari target 36 dokumen dan 40 plang dari target 40 plang atau 100%
- ❖ Penilaian Barang Milik Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 165,392,000 dari target Rp. 217,450,000 atau 76,06 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau 100%.
- ❖ Koordinasi Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 48,079,000 dari target Rp. 49,468,000 atau 97,19 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 69,601,500 dari target Rp. 70,936,000 atau 98,12 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Koordinasi pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 74,005,000 dari target



---

Rp. 74,230,000 atau 99,70 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 4 dokumen dari target 4 dokumen atau 98,00%.

- ❖ konsolidasi Penyusunan laporan barang milik daerah dari SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp. 30,535,000 dari target Rp. 31,469,000 atau 97,03 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen atau 100%.
- ❖ Koordinasi dan Pembinaan pengelolaan barang milik daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 240,229,000 dari target Rp. 250,604,000 atau 95,86 %, dan capaian kinerja terealisasi sebesar 198 orang dari target 198 orang atau 100%.





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang maka dibentuklah Peraturan Walikota Serang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang merupakan perangkat daerah/institusi yang membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Kota Serang. Terkait dengan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Badan yang membawahkan :



- 
- a. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan
    - 3. Sub Bagian Keuangan
  - b. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perumusan Kebijakan APBD
    - 2. Sub Bidang Penyusunan APBD
    - 3. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran
  - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perbendaharaan I
    - 2. Sub Bidang Perbendaharaan II
    - 3. Sub Bidang Kas Daerah
  - d. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah
    - 2. Sub Bidang Pencatatan Aset Daerah
    - 3. Sub Bidang Pelaporan Aset Daerah
  - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
    - 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
    - 3. Sub Bidang Pelaporan



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang didukung oleh 38 pegawai dengan perincian sesuai dengan data pada Bulan Maret Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**

Kondisi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang hingga akhir desember 2021 secara singkat dipaparkan dalam table berikut :

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
KEADAAN PER MARET 2022**

NO	NAMA BIDANG	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SLTA	D.II	D.III	S1	S2	
1	SEKRETARIAT	1	-	2	6	3	12
2	PERBENDAHARAAN	2	-	1	3	3	9
3	ANGGARAN	-	-	-	3	4	7
4	AKUNTANSI	-	-	-	3	2	5
5	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	1	2	2	5
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>38</b>

**Tabel 2.1.2**

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
KEADAAN PER MARET 2022**

NO	NAMA BIDANG	GOLONGAN																JML
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	SEKRETARIA	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	6	-	-	1	1	-	12



T																		
2	PERBENDAHARAAN	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	9
3	ANGGARAN	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-	7
4	AKUNTANSI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	5
5	PENATAUSAHAAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	5
	JUMLAH	0	0	0	0	0	1	5	0	4	0	11	10	5	1	1	0	38

Tabel 2.1.3

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESSELON  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG  
KEADAAN PER MARET 2022

NO	URAIAN	JUMLAH JABATAN	JUMLAH PEJABAT (Orang )
1	Pejabat Eselon II	1	1
2	Pejabat Eselon III A	1	1
3	Pejabat Eselon III B	5	5
4	Pejabat Eselon IV A	20	20
5	Fungsional Umum	3	3
	JUMLAH	30	30

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang telah menentukan visi dan misinya yaitu sebagai berikut:



---

## 1. VISI

Visi merupakan pandangan kedepan yang dapat diyakini oleh banyak orang untuk saling bekerjasama dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkannya tersebut. Visi memegang peranan penting dalam menentukan kemana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang menetapkan Visi Tahun 2019 - 2023 berdasarkan RPJMD Adalah sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya  
2019 - 2023”.***

## 2. MISI

Misi adalah sesuatu yang disusun agar dapat mensukseskan Visi yang telah ditetapkan. Dengan misi yang telah ditetapkan maka organisasi tersebut akan terlihat arah dan gerakan dari apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Isi Misi seyogyanya adalah lngkah-langkah ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut walaupun masih belum spesifik. Adapun Misi BPKAD Kota Serang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan perangkat daerah/institusi yang membantu Walikota dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan menunjukkan bahwa keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Serang yang baik sesuai kaidah *good governance*.

Sebagai faktor yang dominan agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Serang yang memenuhi kriteria *good governance* yaitu pemerintahan yang baik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel salah satunya dalam pengelolaan keuangan dan aset , maka Badan Pengelolaan



---

Keuangan dan Aset Daerah dituntut senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja, mutu pelayanan, dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Apalagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang juga bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu:

1. Pembayaran belanja daerah,
3. Pembayaran bantuan keuangan / hibah, dan belanja tidak terduga.

Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melayani pengelolaan keuangan SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kota Serang, meliputi;

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA - SKPD)
2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA - SKPD)
3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM, dan SP2D)
4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Laporan Keuangan

Secara garis besar gambaran kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel 2.2 yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.





### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penentuan isu-isu strategis ini BPKAD Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan BPKAD Kota Serang lebih baik. Adapun isu-isu strategis itu adalah:

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Profesionalitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Perkembangan Iptek;

Ukuran ataupun indikator atas profesionalisme adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan ataupun pekerjaan sesuai dengan penetapan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Kredibilitas dari BPKAD Kota Serang sendiri sebagai sebuah lembaga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional adalah sebagai keharusan untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari publik karena sifat dan pekerjaan dari BPKAD ini adalah sebagai pelayanan publik. Profesionalisme ini sangat tergantung dari pendayagunaan dan pengoptimalisasian pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini seyogyanya menjadikan sebuah tantangan dan terobosan untuk perbaikan organisasi BPKAD Kota Serang. Peningkatan dalam pembaharuan (*updating*) kemampuan individu terhadap perkembangan teknologi dirasakan harus diselaraskan dengan baik. Oleh karenanya pendayagunaan sumberdaya manusia dengan perkembangan iptek haruslah sejalan dan selaras guna mendukung pada program profesionalisme itu sendiri.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas SDM dan Koordinasi Internal sesuai Perundang-undangan;

Dalam ruang lingkup manajemen keuangan daerah faktor sarana dan



---

prasarana sangatlah penting. Ketika tuntutan akan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah keharusan maka hal tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang. Sehingga indikator keberhasilan ataupun evaluasi pelaksanaan dilapangan akan terlihat jelas. Faktor ini sangat berpengaruh pada kualitas dan koordinasi internal. Adapun peningkatan sarana dan prasarana ini tentunya mengacu pada perundang-undangan yang ada. Harus diakui bahwa untuk mencapai garis ideal ternyata dalam pengaplikasian dilapangan tidaklah mudah. Banyaknya variabel yang sangat signifikan mempengaruhi disandingkan dengan dana yang terbatas juga merupakan indikator penghambat. Oleh karenanya untuk memberikan pelayanan yang ideal dan sesuai dengan teori yang ada tentunya masih memerlukan langkah yang panjang. Tetapi dengan keterbatasan ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap berkomitmen untuk bekerja mensukseskan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah untuk menjadi instansi yang dapat mengelola keuangan dan aset daerah secara jujur, transparan, dan taat azas dengan hasil yang terukur sesuai ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, antara lain;

1. Sebagian pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang mempunyai pengetahuan, pemahaman terhadap peraturan, dan penguasaan teknis pekerjaan maupun teknologi informasi belum mencapai standar yang dibutuhkan.
2. Masih perlunya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk beberapa bidang pekerjaan tertentu.



3. Sistem teknologi informasi yang ada masih terpisah-pisah, perlu upaya untuk mengintegrasikannya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Sistem pengendalian internal yang masih perlu terus disempurnakan.
5. Sebagai instansi yang menjadi gerbang pertama penyusunan anggaran, salah satu tanggung jawabnya adalah mengurangi in-efisiensi/ pemborosan dalam penganggaran dan ketidaktepatan dalam penentuan prioritas penganggaran. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kecermatan dalam mengevaluasi usulan rencana yang diajukan.
6. Masih adanya aset Pemerintah Kota Serang yang belum terdata atau tersertifikat atau diklaim pihak lain.

Selain permasalahan yang dihadapi terdapat pula tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan diantaranya :

#### **Tantangan Eksternal**

1. Ketidakstabilan ekonomi dan suhu politik yang ada di Indonesia serta imbasnya kepada daerah secara nyata berimbas pada perekonomian mikro;
2. Kebebasan media dan informasi yang secara jelas memberikan suatu akses yang bebas terhadap informasi dan transparansi dari pengelolaan keuangan;
3. Perubahan perundangan-undangan yang cepat, sehingga mendorong penatausahaan keuangan dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai;

#### **Peluang Eksternal**

1. Dalam kurun waktu pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010-2015 tren laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif
2. Iklim investasi yang kondusif;



## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa penyusunan Renja OPD BPKAD telah mendasar pada rancangan awal RKPD Tahun 2022 dan secara fokus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab BPKAD. Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merencanakan 2 program, 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.299.962.000 ,-. Namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan lebih lanjut terhadap RKPD tersebut, anggaran pada APBD Murni Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 36.310.580.613,-

Secara rinci, perbandingan antara rancangan awal RKPD Murni Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang dituangkan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.



---

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

BPKAD merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.



---

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

BPKAD merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setiap kebijakan operasional Badan Keuangan Daerah harus mengacu kepada kebijakan nasional yang berlaku, diantaranya adalah :

a. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Serang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam (1) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah serta (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

APBD Kota Serang Tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kebijakan APBN Tahun 2020 mengingat bahwa Belanja Transfer Pemerintah Pusat sangat berkontribusi besar dalam struktur anggaran daerah terutama yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Dana Penyesuaian. Oleh karena itu setiap perubahan kebijakan APBN perlu diantisipasi agar tidak berpengaruh banyak terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD yang bisa berdampak terhadap capaian kinerja pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah adalah:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pendapatan dari sumber ini sangat dipengaruhi kinerja dari aparat Pemerintah Kota yang diberikan kewenangan untuk mengelolanya.
- (2) Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perhitungan dana ini berdasarkan formulasi tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perolehannya sangat tergantung dari alokasi yang ditetapkan untuk Pemerintah Kota Serang.
- (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, juga merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan daerah. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan



pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Adapun untuk penyusunan Belanja Daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran dan kemandirian anggaran yaitu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

Belanja Daerah bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan, di mana tiap-tiap urusan terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Adapaun Belanja Langsung yaitu belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

b. Berkaitan dengan pengelolaan aset

Pengelolaan aset dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Dengan demikian pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, barang milik daerah meliputi:

- (1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
- (2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur.

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2019 – 2023 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008 -2025



Visi Kota Serang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 adalah **“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BUDAYA”**. Sedangkan Misi Kota Serang yaitu :

1. Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan.
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemeberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Adapun Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Misi Keempat.

Salah satunya adalah Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Terdapat 5 tujuan dari misi ini yang berkaitan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan anggaran
2. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
3. Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan
4. Peningkatan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

**Sasaran BPKAD Kota Serang yaitu:**

1. Terciptanya Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengelolaan Keuangan
3. Terpenuhinya Regulasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Peningkatan SDM SKPD dan SKPKD
4. Terciptanya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

**3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti diamanatkan dalam RPJMD Kota Serang dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah ditetapkan rencana kerja prioritas Tahun 2023 yang



dikelompokkan sesuai dengan Misi dalam RPJMD yang berkaitan dengan Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran
2. Mendorong Pengelolaan Investasi dan Kekayaan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan
4. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah
5. Meningkatkan Koordinasi, Konsolidasi Keterpaduan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Untuk mewujudkan rencana kerja tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan 2 Program 12 kegiatan dan 60 sub dengan jumlah anggaran sebesar Rp.46.087.313.151,- yang semuanya bersumber dari APBD Kota Serang. Program, Kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta pagu anggaran yang akan dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 3 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan nilai total sebesar Rp.7.205.200.000,-
2. Program Pengelolaan BMD sebanyak 1 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan nilai total sebesar Rp.5.206.091.550
3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebanyak 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan nilai sebesar Rp.33.676.021.601,-

Berdasarkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam tahun 2021 meliputi :

**I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**, kegiatan dan sub kegiatannya adalah :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran Daerah
  - a. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS



- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS
  - c. Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD
  - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
  - e. Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi perubahan DPA SKPD
  - f. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
  - g. Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang perubahan APBD
  - h. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran.
  - i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
  - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perendaharaan Daerah
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  - b. Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
  - c. Peatausahaan pembiayaan daerah
  - d. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran pihak ketiga (PFK)
  - e. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.
3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- a. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah



- b. Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO dan beban
- c. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- e. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
- f. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah.
- g. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- h. Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota

**II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**, kegiatan dan sub kegiatannya adalah :

- 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - a. Penyusunan standard Harga Satuan
  - b. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
  - c. Penatausahaan barang milik daerah
  - d. Inventarisasi Barang Milik Daerah
  - e. Pengamanan Barang Milik Daerah
  - f. Penilaian Barang Milik Daerah
  - g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
  - h. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.



- i. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporn barang milik daerah.
- j. Penyusunan Laporn Barang Milik Daerah
- k. Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah

**III. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah**, kegiatan dan sub kegiatannya adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
  - b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD
  - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Administras Kepegawaian perangkat daerah
  - a. Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelepngkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan Bahan logistik kantor
  - d. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan



- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - f. Fasilitasi Kunjungan tamu
  - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah
- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - b. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah
- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan pereorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Secara rinci, perumusan program, kegiatan dan sub Badan Keuangan Tahun 2023 dan prakiraan maju rencana Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :



---

## BAB V

### PENUTUP

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2023 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun ke depan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dimana keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi, dan komitmen yang kuat dari seluruh personil.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD Kota Serang Tahun 2023, Renja BPKAD Kota Serang memiliki kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023 berisi perencanaan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
2. Seluruh jajaran pegawai pada BPKAD Kota Serang berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2023, Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023 ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



- 
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2023, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitasnya ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada Bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program,kegitatan dan sub kegiatan sebelumnya.

Serang, Maret 2022

Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Serang

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wachyu B Kristiawan".

**WACHYU B KRISTIAWAN**  
NIP. 19741003 199311 1 003



5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	12	323,931,000	12	531,061,500	12	550,000,000	12	605,000,000	12	665,500,000	12	1,820,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	%	100	117,580,000	100	81,080,000	100	181,500,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	528,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	117,580,000	12	81,080,000	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	496,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	90	39,600,000	90	108,350,000	100	300,000,000	100	330,000,000	100	363,000,000	100	993,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	40	39,600,000	40	108,350,000	38	120,000,000	38	132,000,000	38	145,200,000	38	397,200,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Orang					100	180,000,000	100	198,000,000	100	217,800,000	100	595,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	100	977,451,105	100	1,432,819,871	100	2,053,000,000	100	2,258,300,000	100	2,484,130,000	100	6,795,430,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	47,689,000	12	101,767,500	12	110,000,000	12	121,000,000	12	133,100,000	12	364,100,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	197,654,000	12	198,763,300	12	200,000,000	12	220,000,000	12	242,000,000	12	662,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	165,426,000	12	125,440,000	12	130,000,000	12	143,000,000	12	157,300,000	12	430,300,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	331,188,050	12	414,929,750	12	550,000,000	12	605,000,000	12	665,500,000	12	1,820,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	12	59,872,000	12	41,520,000	12	160,000,000	12	176,000,000	12	193,600,000	12	529,600,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	15,000,000	12	14,000,000	12	33,000,000	12	36,300,000	12	39,930,000	12	109,230,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	160,622,055	12	536,399,321	12	750,000,000	12	825,000,000	12	907,500,000	12	2,482,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	120,000,000	1	132,000,000	1	145,200,000	1	397,200,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah	%	100	343,600,000	100	1,669,595,018	100	2,880,000,000	100	3,168,000,000	100	3,484,800,000	100	9,532,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					4	1,320,000,000	4	1,452,000,000	4	1,597,200,000	4	4,369,200,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					10	50,000,000	10	55,000,000	10	60,500,000	10	165,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	135	178,600,000	135	877,270,018	15	850,000,000	15	935,000,000	15	1,028,500,000	15	2,813,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	165,000,000	3	660,000,000	3	660,000,000	3	726,000,000	3	798,600,000	3	2,184,600,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD	%	100	636,086,881	100	761,423,430	100	980,000,000	100	1,078,000,000	100	1,185,800,000	100	3,243,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3600	47,476,000	3600	50,000,000	12	80,000,000	12	88,000,000	12	96,800,000	12	264,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	272,356,381	12	343,436,930	12	400,000,000	12	440,000,000	12	484,000,000	12	1,324,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	316,254,500	12	367,986,500	12	500,000,000	12	550,000,000	12	605,000,000	12	1,655,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG

	5	02	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	<b>1,292,684,500</b>	100	<b>1,423,045,900</b>	100	<b>2,103,000,000</b>	100	<b>2,313,300,000</b>	100	<b>2,544,630,000</b>	100	<b>6,960,930,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG	
	5	02	01	2.09	01	Perencanaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	948,268,400	12	889,855,900	36	1,300,000,000	36	1,430,000,000	36	1,573,000,000	36	<b>4,303,000,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	12	194,691,100	12	234,215,000	36	303,000,000	36	333,300,000	36	366,630,000	36	<b>1,002,930,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
	5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	12	149,725,000	12	298,975,000	36	500,000,000	36	550,000,000	36	605,000,000	36	<b>1,655,000,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
	5	02	02			<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase ketepatan waktu penganggaran	%	100		100		100		100		100		100	<b>33,298,600,000</b>		KOTA SERANG
							Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah	%	100	<b>4,705,887,360</b>	100	<b>7,120,222,700</b>	100	<b>10,060,000,000</b>	100	<b>11,066,000,000</b>	100	<b>12,172,600,000</b>	100	<b>0</b>		KOTA SERANG
							Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	%	100		100		100		100		100		<b>0</b>			KOTA SERANG
	5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	Capaian Ketepatan waktu Penganggaran	%	81.25	<b>2,390,064,100</b>	81.25	<b>3,210,178,270</b>	100	<b>3,850,000,000</b>	100	<b>4,235,000,000</b>	100	<b>4,658,500,000</b>	100	<b>12,743,500,000</b>		KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	33	580,365,500	33	647,506,383	1	770,000,000	1	847,000,000	1	931,700,000	1	<b>2,548,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	33	117,466,000	33	155,749,900	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	<b>827,500,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	33	163,125,000	33	264,985,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	<b>827,500,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	33	143,775,000	33	252,358,000	1	170,000,000	1	187,000,000	1	205,700,000	1	<b>562,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	2	25,720,000	2	36,300,000	1	70,000,000	1	77,000,000	1	84,700,000	1	<b>231,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	2	27,145,000	2	37,000,000	1	120,000,000	1	132,000,000	1	145,200,000	1	<b>397,200,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Dokumen	1	363,615,050	1	561,675,200	2	730,000,000	2	803,000,000	2	883,300,000	2	<b>2,416,300,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	2	562,127,100	2	409,514,900	2	500,000,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	<b>1,655,000,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen	2	113,297,800	2	547,772,387	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	<b>662,000,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	10	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Dokumen	9	124,855,000	9	121,961,500	1	180,000,000	1	198,000,000	1	217,800,000	1	<b>595,800,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	11	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen	33	168,572,650	33	175,355,000	1	320,000,000	1	352,000,000	1	387,200,000	1	<b>1,059,200,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	12	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Dokumen					1	120,000,000	1	132,000,000	1	145,200,000	1	<b>397,200,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	170,000,000	1	187,000,000	1	205,700,000	1	<b>562,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>	Capaian Penerbitan SPD dan SP2D	Dokumen	100	<b>989,892,510</b>	100	<b>2,250,809,930</b>	276,16000	<b>3,200,000,000</b>	276,16000	<b>3,520,000,000</b>	276,16000	<b>3,872,000,000</b>	276,16000	<b>10,592,000,000</b>	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	3	161,096,510	3	239,269,790	3	450,000,000	3	495,000,000	3	544,500,000	3	<b>1,489,500,000</b>	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG

5	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	3	281,210,000	3	986,832,500	3	950,000,000	3	1,045,000,000	3	1,149,500,000	3	3,144,500,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2	243,916,000	2	404,855,000	2	500,000,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	1,655,000,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	115	210,700,000	115	470,366,240	1	800,000,000	1	880,000,000	1	968,000,000	1	2,648,000,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	4	92,970,000	4	149,486,400	4	500,000,000	4	550,000,000	4	605,000,000	4	1,655,000,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi pemerintahan	%	100	1,325,930,750	100	1,659,234,500	100	3,010,000,000	100	3,311,000,000	100	3,642,100,000	100	9,963,100,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	3	294,570,000	3	246,585,000	4	600,000,000	4	660,000,000	4	726,000,000	4	1,986,000,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	4	58,197,500	4	248,597,750	4	650,000,000	4	715,000,000	4	786,500,000	4	2,151,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	266,573,500	2	467,923,500	2	450,000,000	2	495,000,000	2	544,500,000	2	1,489,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	366,625,750	1	369,550,250	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	1,655,000,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	59,065,000	1	29,050,000	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	496,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen					1	130,000,000	1	143,000,000	1	157,300,000	1	430,300,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	64,920,000	1	111,700,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	331,000,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	27,900,000	1	47,990,000	1	80,000,000	1	88,000,000	1	96,800,000	1	264,800,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	198	188,079,000	198	137,838,000	198	350,000,000	198	385,000,000	198	423,500,000	198	1,158,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD	%	100	1,432,261,380	100	3,019,116,140	80	6,530,000,000	80	7,183,000,000	80	7,901,300,000	80	21,614,300,000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	1,432,261,380	100	3,019,116,140	95	6,530,000,000	95	7,183,000,000	95	7,901,300,000	95	21,614,300,000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	1	197,931,000	1	613,619,500	2	850,000,000	2	935,000,000	2	1,028,500,000	2	2,813,500,000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG

	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD	Dokumen	198	77,983,000	198	151,427,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	<b>827,500,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD	Dokumen	1	305,860,000	1	301,370,000	1	400,000,000	1	440,000,000	1	484,000,000	1	<b>1,324,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	Dokumen	2	59,880,000	2	108,145,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	665,500,000	2	<b>1,820,500,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan BMD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD	Dokumen Plang	177/921	162,765,880	177/921	459,552,000	177.921	2,000,000,000	177.921	2,200,000,000	177.921	2,420,000,000	177.921	<b>6,620,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	08	Penilaian BMD	Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD	Dokumen	1	165,392,000	1	316,216,400	1	600,000,000	1	660,000,000	1	726,000,000	1	<b>1,986,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Dokumen	2	48,079,000	2	74,890,000	2	100,000,000	2	110,000,000	2	121,000,000	2	<b>331,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Laporan	2	69,601,500	2	273,573,230	2	500,000,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	<b>1,655,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD	Dokumen	4	74,005,000	4	341,196,010	12	500,000,000	12	550,000,000	12	605,000,000	12	<b>1,655,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Dokumen BMD	Dokumen	2	30,535,000	2	84,745,000	2	130,000,000	2	143,000,000	2	157,300,000	2	<b>430,300,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD	Orang	198	240,229,000	198	294,382,000	198	650,000,000	198	715,000,000	198	786,500,000	198	<b>2,151,500,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG

Tabel 3.2

## RUMUSAN DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR RENJA PD TAHUN 2023

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/FORMULA
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini		Realisasi penilaian opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan Daerah
	Capaian Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%		komposit penilaian pengelolaan keuangan ( 4 indikator sasaran)
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Baik dan Akuntabel	Capaian Tertib Pengelolaan BMD	%		Realisasi pengelolaan (sesuai ketentuan) BMD perangkat Daerah
	Capaian Akuntabilitas Keuangan Daerah	%		realisasi ketepatan pelaporan keuangan sesuai azas yang berlaku
	Capaian Ketepatan Waktu Penganggaran	%		Realisasi ketepatan penyusunan APBD sesuai azas yang berlaku
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	%		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja beserta perubahannya), IKU dan PK.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Jumlah Dokumen RKA-SKPD (1 dokumen), dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 dokumen), dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Jumlah Dokumen DPA-SKPD (1 dokumen), dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 dokumen), dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Jumlah Laporan yang terkait dengan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (terdiri dari evaluasi Renja, LKjIP, dan lainnya), dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1 laporan).
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		jumlah dokumen profil PD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan), dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan SKPKD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD , dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Jumlah Laporan terkait dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%		

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan untuk per orang per jenis pakaian dinas
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan berdasarkan jumlah instalasi listrik/penerangan bangun kantor yang ada
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan berdasarkan fungsinya dan/atau pengelompokkan berdasarkan rekening sub rincian objek belanja
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan berdasarkan fungsinya dan/atau pengelompokkan berdasarkan rekening sub rincian objek belanja
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan berdasarkan fungsinya
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan/diadakan

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu per bulan (1 laporan untuk 1 bulan)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD per bulan (1 laporan untuk 1 bulan)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah	%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit		Jumlah unit Mebel yang Diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD	%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat per bulan (1 laporan untuk 1 bulan)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan per bulan (1 laporan untuk 1 bulan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan berdasarkan jumlah dan jenis penyediaan pelayanan umum kantor
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		cukup jelas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit		cukup jelas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit		cukup jelas
<b>Penataan Organisasi</b>	Persentase Peningkatan Penataan Organisasi PD	%		
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase ketepatan waktu penganggaran	%		Reformasi Birokrasi
	Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah	%		Realisasi rata-rata Kesesuaian laporan keuangan perangkat daerah dengan Standar Akutansi Pemerintah
	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	%		Realisasi persentase kinerja Perangkat Daerah
<b>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	Capaian Ketepatan waktu Penganggaran	%		
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen		Jumlah Dokumen perubahan KUA dan perubahanPPAS
Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen		Jumlah Dokumen Verifikasi RKA - SKPD
Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen		Jumlah Dokumen Verifikasi Perubahan RKA - SKPD
Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen		Jumlah Dokumen Verifikasi DPA - SKPD
Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen		Jumlah Dokumen Verifikasi Perubahan DPA - SKPD
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Dokumen		Jumlah Dokumen Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen		Jumlah Dokumen Perda tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang anggaran
Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Dokumen		Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pendapatan daerah
Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah
Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan daerah
Pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen		Jumlah orang yang terbinan dalam perencanaan penganggaran daerah
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>	Capaian Penerbitan SPD dan SP2D	Dokumen		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen		Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	%		
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen		Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD	%		
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah	%		Realisasi PD yang melaksanakan ( Perencanaan, Pencatatan dan pelaporan) Barang Milik Daerah
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen		Jumlah SHS
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD	Orang		Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD
Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD	Dokumen		Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD

Inventarisasi BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	Dokumen		Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD
Pengamanan BMD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD	Dokumen Plang		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD
Penilaian BMD	Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD	Dokumen		Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Dokumen		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD
Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Laporan		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD	Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD
Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Dokumen BMD	Dokumen		Jumlah Laporan Dokumen BMD
Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD	Orang		Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD

TABEL 2.2

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

## KOTA SERANG

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)		CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		12
					46,087,313,151				46,087,313,151		
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Serang	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100	33,676,021,601	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100	33,676,021,601	<b>KURUD</b>	<b>AKHIR</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	1,597,200,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	1,597,200,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	427,741,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	427,741,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	132,805,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	132,805,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	75,410,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	75,410,000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	147,850,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	147,850,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	96,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	96,800,000		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	429,004,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	429,004,000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	287,590,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	287,590,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Serang	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	<b>24,165,401,818</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	<b>24,165,401,818</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Serang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	23,499,901,818	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	23,499,901,818		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	164,015,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	164,015,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Serang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	501,485,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	12	501,485,000		
	Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Serang	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	100	<b>181,500,000</b>	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	100	<b>181,500,000</b>		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Serang	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	181,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	181,500,000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Serang	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	100	<b>336,850,000</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	100	<b>336,850,000</b>		

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Serang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	38	92,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	38	92,200,000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Serang	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	100	244,650,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	100	244,650,000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Serang	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	100	<b>1,948,412,017</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	100	<b>1,948,412,017</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Serang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	145,227,145	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	145,227,145		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Serang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	200,038,252	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	200,038,252		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Serang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	129,792,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	129,792,000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	504,900,620	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	504,900,620		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Serang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12	136,755,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	12	136,755,000		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Serang	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	30,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	30,000,000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Serang	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	717,999,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	717,999,000		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Serang	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	83,700,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	83,700,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Serang	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah	100	<b>2,766,576,400</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah	100	<b>2,766,576,400</b>		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4	1,200,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4	1,200,000,000		
	Pengadaan Mebel	Kota Serang	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	43,500,000	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	43,500,000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15	1,163,076,400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15	1,163,076,400		

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	360,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3	360,000,000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Serang	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD	100	<b>926,631,382</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD	100	<b>926,631,382</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Serang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	100,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	100,000,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Serang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	393,635,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	393,635,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	432,996,382	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	432,996,382		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Serang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	<b>1,668,774,984</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	<b>1,668,774,984</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Serang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36	1,174,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36	1,174,700,000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	36	202,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	36	202,000,000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	36	292,074,984	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	36	292,074,984		
	Penataan Organisasi	Kota Serang	Persentase Peningkatan Penataan Organisasi PD	100	<b>84,675,000</b>	Penataan Organisasi	Persentase Peningkatan Penataan Organisasi PD	100	<b>84,675,000</b>		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Serang	Jumlah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	84,675,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	84,675,000		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Serang	Persentase ketepatan waktu penganggaran	100	<b>7,205,200,000</b>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penganggaran	100	<b>7,205,200,000</b>		
		Kota Serang	Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah	100			Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah	100			
		Kota Serang	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	100			Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	100			
	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kota Serang	Capaian Ketepatan waktu Penganggaran	100	<b>3,539,600,000</b>	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Capaian Ketepatan waktu Penganggaran	100	<b>3,539,600,000</b>	<b>3,275,621,000</b>	3,575,621,000

	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Kota Serang	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1	629,200,000	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1	629,200,000		
	Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Kota Serang	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1	508,200,000	Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1	508,200,000		
	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Kota Serang	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1	262,674,000	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1	262,674,000		
	Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	Kota Serang	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1	120,585,000	Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1	120,585,000		
	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	1	36,025,000	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	1	36,025,000		
	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Kota Serang	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	1	110,635,000	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	1	110,635,000		
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Kota Serang	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2	661,601,000	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2	661,601,000		
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Kota Serang	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	2	538,780,000	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	2	538,780,000		
	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Kota Serang	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	1	181,500,000	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	1	181,500,000		
	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Kota Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1	145,200,000	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1	145,200,000		
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Kota Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1	145,200,000	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1	145,200,000		
	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Kota Serang	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	1	100,000,000	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	1	100,000,000		
	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	100,000,000	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	100,000,000		
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>	Kota Serang	Capaian Penerbitan SPD dan SP2D	276, 16000	<b>1,661,990,000</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>	Capaian Penerbitan SPD dan SP2D	276, 16000	<b>1,661,990,000</b>	<b>-989,410,750</b>	2,651,400,750
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	326,700,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	326,700,000		
	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3	332,590,000	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3	332,590,000		

	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	373,500,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	373,500,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Serang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1	302,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1	302,500,000		
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4	326,700,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4	326,700,000		
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Kota Serang	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi pemerintahan	100	<b>2,003,610,000</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi pemerintahan	100	<b>2,003,610,000</b>		
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Serang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	181,500,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	181,500,000		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4	157,300,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4	157,300,000		
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi	Kota Serang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	508,200,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	508,200,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	205,700,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	205,700,000		

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	83,100,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	83,100,000		
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	217,800,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	217,800,000		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Serang	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	157,300,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	157,300,000		
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Serang	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	157,300,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	157,300,000		
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Serang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	198	335,410,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	198	335,410,000		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Kota Serang	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD	80	<b>5,206,091,550</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD	80	<b>5,206,091,550</b>		
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Kota Serang	Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah	95	<b>5,206,091,550</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah	95	<b>5,206,091,550</b>		6,206,091,550
	Penyusunan Standar Harga	Kota Serang	Jumlah Standar Harga yang disusun	2	302,500,000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	2	302,500,000		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Kota Serang	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD	198	447,700,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD	198	447,700,000		
	Penatausahaan BMD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD	1	617,771,550	Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD	1	617,771,550		
	Inventarisasi BMD	Kota Serang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	2	266,200,000	Inventarisasi BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	2	266,200,000		
	Pengamanan BMD	Kota Serang	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD	177.921	968,000,000	Pengamanan BMD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD	177.921	968,000,000		
	Penilaian BMD	Kota Serang	Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD	1	363,000,000	Penilaian BMD	Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD	1	363,000,000		
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Kota Serang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	2	242,000,000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	2	242,000,000		
	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Kota Serang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	2	302,500,000	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	2	302,500,000		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Kota Serang	Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD	12	605,000,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD	12	605,000,000		

	Penyusunan Laporan BMD	Kota Serang	Jumlah Laporan Dokumen BMD	2	559,020,000	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Dokumen BMD	2	559,020,000		
	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	Kota Serang	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD	198	532,400,000	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD	198	532,400,000		



5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	2	2	2	100	2	6	75
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	48	80
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	48	80
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	12	12	12	100	12	48	80
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	50	10	10	10	100	10	40	1000
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	100	75	80	80	100	85	85	85
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	25	25	25	100	100	75	75
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80

5	02	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.05	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	12	12	12	100	100	48	80

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	60	12	12	12	100	100	48	80
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	60	12	12	12	100	12	36	900
5	02	02			<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase ketepatan waktu penganggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
						Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	Capaian Ketepatan waktu Penganggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.01	02	Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang	165	33	33	33	100	33	132	80
5	02	02	2.01	03	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	165	33	33	33	100	33	132	80

5	02	02	2.01	04	Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	165	33	33	33	100	33	132	80
5	02	02	2.01	05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	165	33	33	33	100	33	132	80
5	02	02	2.01	06	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	165	33	33	33	100	33	132	80
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	5	1	1	1	100	1	3	75
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan	10	2	2	2	100	2	3	75
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	165	33	33	33	100	33	132	80
5	02	02	2.01	10	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	165	33	33	33	100	33	132	80
5	02	02	2.01	11	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	165	33	33	33	100	33	132	80
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Capaian Penerbitan SPD dan SP2D	71,380	14276	14276	14276	100	14276	57,104	80
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15	3	3	3	100	3	12	80
5	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15	3	3	3	100	3	12	80
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	10	2	2	2	100	2	8	80

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	575	115	115	115	100	115	460	80
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	20	4	4	4	100	4	16	80
5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	20	4	4	4	100	4	16	80
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	20	4	4	4	100	4	16	80
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	20	4	4	4	100	4	12	300
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	8	80

5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	1	1	1	100	1	3	75
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	1	3	75
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	1	1	1	100	1	3	75
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	990	198	198	198	100	198	792	80
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD	95	20	20	20	100	20	60	63
5	02	03	2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah	95	20	20	20	100	20	60	63
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	10	2	2	2	100	2	8	80
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD	1	1	1	1	100	1	1	100
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD	5	1	1	1	100	1	3	75
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	10	2	2	2	100	2	8	80
5	02	03	2.01	07			885	177	177	177	100	177	708	80

Berapanya BMD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan

					Pengamanan BMD	Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD	4,605	921	921	921	100	921	3,684	80
5	02	03	2.01	08	Penilaian BMD	Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD	5	1	1	1	100	1	3	75
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	10	2	2	2	100	2	8	80
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	10	2	2	2	100	2	8	80
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD	20	4	4	4	100	4	16	80
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Dokumen BMD	10	2	2	2	100	2	8	80
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD	990	198	198	198	100	198	792	80

LAPORAN HASIL VERIFIKASI

REKAPITULASI KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 20

OPD : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DA**

REKAPITULASI KESESUAIAN PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENSTRA PD, RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD					
KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP)			CATATAN/KETERANGAN
		RENSTRA PD	RKPD	RENJA PD	
1	2	9	10	11	12
		47,076,723,901	47,076,723,901	47,076,723,901	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	33,676,021,601	33,676,021,601	33,676,021,601	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1,597,200,000	1,597,200,000	1,597,200,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	427,741,000	427,741,000	427,741,000	

		132,805,000	132,805,000	132,805,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD				
		75,410,000	75,410,000	75,410,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		147,850,000	147,850,000	147,850,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		96,800,000	96,800,000	96,800,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD				
		429,004,000	429,004,000	429,004,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		287,590,000	287,590,000	287,590,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>24,165,401,818</b>	<b>24,165,401,818</b>	<b>24,165,401,818</b>	
		23,499,901,818	23,499,901,818	23,499,901,818	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	164,015,000	164,015,000	164,015,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	501,485,000	501,485,000	501,485,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>181,500,000</b>	<b>181,500,000</b>	<b>181,500,000</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	181,500,000	181,500,000	181,500,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>336,850,000</b>	<b>336,850,000</b>	<b>336,850,000</b>	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	92,200,000	92,200,000	92,200,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	244,650,000	244,650,000	244,650,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,948,412,017</b>	<b>1,948,412,017</b>	<b>1,948,412,017</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	145,227,145	145,227,145	145,227,145	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,038,252	200,038,252	200,038,252	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,792,000	129,792,000	129,792,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	504,900,620	504,900,620	504,900,620	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	136,755,000	136,755,000	136,755,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	717,999,000	717,999,000	717,999,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	83,700,000	83,700,000	83,700,000	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2,766,576,400</b>	<b>2,766,576,400</b>	<b>2,766,576,400</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	
	Pengadaan Mebel	43,500,000	43,500,000	43,500,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,163,076,400	1,163,076,400	1,163,076,400	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360,000,000	360,000,000	360,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>926,631,382</b>	<b>926,631,382</b>	<b>926,631,382</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393,635,000	393,635,000	393,635,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432,996,382	432,996,382	432,996,382	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,668,774,984</b>	<b>1,668,774,984</b>	<b>1,668,774,984</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,174,700,000	1,174,700,000	1,174,700,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202,000,000	202,000,000	202,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	292,074,984	292,074,984	292,074,984	
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>84,675,000</b>	<b>84,675,000</b>	<b>84,675,000</b>	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84,675,000	84,675,000	84,675,000	
	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>8,194,610,750</b>	<b>8,194,610,750</b>	<b>8,194,610,750</b>	
	<b>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	<b>3,539,600,000</b>	<b>3,539,600,000</b>	<b>3,539,600,000</b>	
	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	629,200,000	629,200,000	629,200,000	
	Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	508,200,000	508,200,000	508,200,000	

	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	262,674,000	262,674,000	262,674,000	
	Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	120,585,000	120,585,000	120,585,000	
	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	36,025,000	36,025,000	36,025,000	
	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	110,635,000	110,635,000	110,635,000	
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	661,601,000	661,601,000	661,601,000	
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	538,780,000	538,780,000	538,780,000	
	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	181,500,000	181,500,000	181,500,000	
	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	145,200,000	145,200,000	145,200,000	
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	145,200,000	145,200,000	145,200,000	
	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>	<b>2,651,400,750</b>	<b>2,651,400,750</b>	<b>2,651,400,750</b>	<b>3,151,400,750</b>

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	316,910,000	316,910,000	316,910,000	<b>500,000,000</b>
	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	955,470,750	955,470,750	955,470,750	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	421,500,000	421,500,000	421,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	630,820,000	630,820,000	630,820,000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	326,700,000	326,700,000	326,700,000	
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2,003,610,000</b>	<b>2,003,610,000</b>	<b>2,003,610,000</b>	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	181,500,000	181,500,000	181,500,000	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	157,300,000	157,300,000	157,300,000	

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi	508,200,000	508,200,000	508,200,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	205,700,000	205,700,000	205,700,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	83,100,000	83,100,000	83,100,000	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	217,800,000	217,800,000	217,800,000	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	157,300,000	157,300,000	157,300,000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	157,300,000	157,300,000	157,300,000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	335,410,000	335,410,000	335,410,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>5,206,091,550</b>	<b>5,206,091,550</b>	<b>5,206,091,550</b>	

	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>5,206,091,550</b>	<b>5,206,091,550</b>	<b>5,206,091,550</b>	
	Penyusunan Standar Harga	302,500,000	302,500,000	302,500,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	447,700,000	447,700,000	447,700,000	
	Penatausahaan BMD	617,771,550	617,771,550	617,771,550	
	Inventarisasi BMD	266,200,000	266,200,000	266,200,000	
	Pengamanan BMD	968,000,000	968,000,000	968,000,000	
	Penilaian BMD	363,000,000	363,000,000	363,000,000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	242,000,000	242,000,000	242,000,000	
	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	302,500,000	302,500,000	302,500,000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	605,000,000	605,000,000	605,000,000	
	Penyusunan Laporan BMD	559,020,000	559,020,000	559,020,000	
	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	532,400,000	532,400,000	532,400,000	

SERANG, 12 JULI 2022

KOORDINATOR

VERIFIKATOR

(.....)

.....)



5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	12	323,931,000	12	531,061,500	12	550,000,000	12	605,000,000	12	665,500,000	12	1,820,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	%	100	117,580,000	100	81,080,000	100	181,500,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	528,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	117,580,000	12	81,080,000	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	496,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	90	39,600,000	90	108,350,000	100	300,000,000	100	330,000,000	100	363,000,000	100	993,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	40	39,600,000	40	108,350,000	38	120,000,000	38	132,000,000	38	145,200,000	38	397,200,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Orang					100	180,000,000	100	198,000,000	100	217,800,000	100	595,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum	%	100	977,451,105	100	1,432,819,871	100	2,053,000,000	100	2,258,300,000	100	2,484,130,000	100	6,795,430,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	47,689,000	12	101,767,500	12	110,000,000	12	121,000,000	12	133,100,000	12	364,100,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	197,654,000	12	198,763,300	12	200,000,000	12	220,000,000	12	242,000,000	12	662,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	165,426,000	12	125,440,000	12	130,000,000	12	143,000,000	12	157,300,000	12	430,300,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	331,188,050	12	414,929,750	12	550,000,000	12	605,000,000	12	665,500,000	12	1,820,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	12	59,872,000	12	41,520,000	12	160,000,000	12	176,000,000	12	193,600,000	12	529,600,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	15,000,000	12	14,000,000	12	33,000,000	12	36,300,000	12	39,930,000	12	109,230,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	160,622,055	12	536,399,321	12	750,000,000	12	825,000,000	12	907,500,000	12	2,482,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.05	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	120,000,000	1	132,000,000	1	145,200,000	1	397,200,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah	%	100	343,600,000	100	1,669,595,018	100	2,880,000,000	100	3,168,000,000	100	3,484,800,000	100	9,532,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					4	1,320,000,000	4	1,452,000,000	4	1,597,200,000	4	4,369,200,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					10	50,000,000	10	55,000,000	10	60,500,000	10	165,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	135	178,600,000	135	877,270,018	15	850,000,000	15	935,000,000	15	1,028,500,000	15	2,813,500,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	165,000,000	3	660,000,000	3	660,000,000	3	726,000,000	3	798,600,000	3	2,184,600,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Jasa Penunjang PD	%	100	636,086,881	100	761,423,430	100	980,000,000	100	1,078,000,000	100	1,185,800,000	100	3,243,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3600	47,476,000	3600	50,000,000	12	80,000,000	12	88,000,000	12	96,800,000	12	264,800,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	272,356,381	12	343,436,930	12	400,000,000	12	440,000,000	12	484,000,000	12	1,324,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	316,254,500	12	367,986,500	12	500,000,000	12	550,000,000	12	605,000,000	12	1,655,000,000	SEKRETARIAT	KOTA SERANG

	5	02	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	<b>1,292,684,500</b>	100	<b>1,423,045,900</b>	100	<b>2,103,000,000</b>	100	<b>2,313,300,000</b>	100	<b>2,544,630,000</b>	100	<b>6,960,930,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG	
	5	02	01	2.09	01	Perencanaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	948,268,400	12	889,855,900	36	1,300,000,000	36	1,430,000,000	36	1,573,000,000	36	<b>4,303,000,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	12	194,691,100	12	234,215,000	36	303,000,000	36	333,300,000	36	366,630,000	36	<b>1,002,930,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
	5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	12	149,725,000	12	298,975,000	36	500,000,000	36	550,000,000	36	605,000,000	36	<b>1,655,000,000</b>	SEKRETARIAT	KOTA SERANG
	5	02	02			<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase ketepatan waktu penganggaran	%	100		100		100		100		100		100	<b>33,298,600,000</b>		KOTA SERANG
							Capaian sistem pengelolaan keuangan daerah	%	100	<b>4,705,887,360</b>	100	<b>7,120,222,700</b>	100	<b>10,060,000,000</b>	100	<b>11,066,000,000</b>	100	<b>12,172,600,000</b>	100	<b>0</b>		KOTA SERANG
							Persentase kesesuaian pelaporan dengan standard akuntansi pemerintahan	%	100		100		100		100		100		<b>0</b>			KOTA SERANG
	5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>	Capaian Ketepatan waktu Penganggaran	%	81.25	<b>2,390,064,100</b>	81.25	<b>3,210,178,270</b>	100	<b>3,850,000,000</b>	100	<b>4,235,000,000</b>	100	<b>4,658,500,000</b>	100	<b>12,743,500,000</b>		KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	33	580,365,500	33	647,506,383	1	770,000,000	1	847,000,000	1	931,700,000	1	<b>2,548,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	33	117,466,000	33	155,749,900	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	<b>827,500,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	33	163,125,000	33	264,985,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	<b>827,500,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi penyusunan dan perubahan RKA SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	33	143,775,000	33	252,358,000	1	170,000,000	1	187,000,000	1	205,700,000	1	<b>562,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	05	Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	2	25,720,000	2	36,300,000	1	70,000,000	1	77,000,000	1	84,700,000	1	<b>231,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Dokumen	2	27,145,000	2	37,000,000	1	120,000,000	1	132,000,000	1	145,200,000	1	<b>397,200,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Dokumen	1	363,615,050	1	561,675,200	2	730,000,000	2	803,000,000	2	883,300,000	2	<b>2,416,300,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Dokumen	2	562,127,100	2	409,514,900	2	500,000,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	<b>1,655,000,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen	2	113,297,800	2	547,772,387	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	<b>662,000,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	10	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Dokumen	9	124,855,000	9	121,961,500	1	180,000,000	1	198,000,000	1	217,800,000	1	<b>595,800,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	11	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen	33	168,572,650	33	175,355,000	1	320,000,000	1	352,000,000	1	387,200,000	1	<b>1,059,200,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	12	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Dokumen					1	120,000,000	1	132,000,000	1	145,200,000	1	<b>397,200,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	170,000,000	1	187,000,000	1	205,700,000	1	<b>562,700,000</b>	BIDANG ANGGARAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</b>	Capaian Penerbitan SPD dan SP2D	Dokumen	100	<b>989,892,510</b>	100	<b>2,250,809,930</b>	276,16000	<b>3,200,000,000</b>	276,16000	<b>3,520,000,000</b>	276,16000	<b>3,872,000,000</b>	276,16000	<b>10,592,000,000</b>	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	3	161,096,510	3	239,269,790	3	450,000,000	3	495,000,000	3	544,500,000	3	<b>1,489,500,000</b>	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG

5	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	3	281,210,000	3	986,832,500	3	950,000,000	3	1,045,000,000	3	1,149,500,000	3	3,144,500,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2	243,916,000	2	404,855,000	2	500,000,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	1,655,000,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	115	210,700,000	115	470,366,240	1	800,000,000	1	880,000,000	1	968,000,000	1	2,648,000,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	4	92,970,000	4	149,486,400	4	500,000,000	4	550,000,000	4	605,000,000	4	1,655,000,000	BIDANG PERBENDAHARAAN	KOTA SERANG
5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Persentase kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi pemerintahan	%	100	1,325,930,750	100	1,659,234,500	100	3,010,000,000	100	3,311,000,000	100	3,642,100,000	100	9,963,100,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	3	294,570,000	3	246,585,000	4	600,000,000	4	660,000,000	4	726,000,000	4	1,986,000,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	4	58,197,500	4	248,597,750	4	650,000,000	4	715,000,000	4	786,500,000	4	2,151,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	266,573,500	2	467,923,500	2	450,000,000	2	495,000,000	2	544,500,000	2	1,489,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	366,625,750	1	369,550,250	1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	1,655,000,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	59,065,000	1	29,050,000	1	150,000,000	1	165,000,000	1	181,500,000	1	496,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen					1	130,000,000	1	143,000,000	1	157,300,000	1	430,300,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	64,920,000	1	111,700,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	331,000,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	27,900,000	1	47,990,000	1	80,000,000	1	88,000,000	1	96,800,000	1	264,800,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	198	188,079,000	198	137,838,000	198	350,000,000	198	385,000,000	198	423,500,000	198	1,158,500,000	BIDANG AKUNTANSI	KOTA SERANG
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD	%	100	1,432,261,380	100	3,019,116,140	80	6,530,000,000	80	7,183,000,000	80	7,901,300,000	80	21,614,300,000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Capaian Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	1,432,261,380	100	3,019,116,140	95	6,530,000,000	95	7,183,000,000	95	7,901,300,000	95	21,614,300,000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	1	197,931,000	1	613,619,500	2	850,000,000	2	935,000,000	2	1,028,500,000	2	2,813,500,000	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG

	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Peserta Pembinaan Teknik BMD	Dokumen	198	77,983,000	198	151,427,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	302,500,000	1	<b>827,500,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data BMD	Dokumen	1	305,860,000	1	301,370,000	1	400,000,000	1	440,000,000	1	484,000,000	1	<b>1,324,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	Dokumen	2	59,880,000	2	108,145,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	665,500,000	2	<b>1,820,500,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan BMD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perencana, Pemeliharaan / Perawatan BMD	Dokumen Plang	177/921	162,765,880	177/921	459,552,000	177.921	2,000,000,000	177.921	2,200,000,000	177.921	2,420,000,000	177.921	<b>6,620,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	08	Penilaian BMD	Jumlah Koordinasi Hasil Penilaian BMD	Dokumen	1	165,392,000	1	316,216,400	1	600,000,000	1	660,000,000	1	726,000,000	1	<b>1,986,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Dokumen	2	48,079,000	2	74,890,000	2	100,000,000	2	110,000,000	2	121,000,000	2	<b>331,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Pengguna, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Laporan	2	69,601,500	2	273,573,230	2	500,000,000	2	550,000,000	2	605,000,000	2	<b>1,655,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Rekon BMD	Dokumen	4	74,005,000	4	341,196,010	12	500,000,000	12	550,000,000	12	605,000,000	12	<b>1,655,000,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Dokumen BMD	Dokumen	2	30,535,000	2	84,745,000	2	130,000,000	2	143,000,000	2	157,300,000	2	<b>430,300,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis BMD	Orang	198	240,229,000	198	294,382,000	198	650,000,000	198	715,000,000	198	786,500,000	198	<b>2,151,500,000</b>	BIDANG PENGELOLAAN BMD	KOTA SERANG